

## TATA KELOLA PEMERINTAHAN NAGARI DENGAN MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DI NAGARI SUNGAI CUBADAK

### *NAGARI GOVERNANCE WITH A COLLABORATIVE GOVERNANCE MODELIN NAGARI SUNGAI CUBADAK*

Efendi Idris<sup>1</sup>, Khairul<sup>2</sup>

Magister Manajemen ITB Haji Agus Salim<sup>1</sup>, Ilmu Administrasi Negara STIA Adabiah<sup>2</sup>  
[fendisikumbang81@gmail.com](mailto:fendisikumbang81@gmail.com), [65khairul65@gmail.com](mailto:65khairul65@gmail.com)

**ABSTRAK:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan tata kelola pemerintahan dengan model *collaborative governance* di Nagari Sungai Cubadak. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai metode penelitian untuk menemukan dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi dilapangan terkait tata kelola pemerintahan di Nagari Sungai Cubadak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi dalam tata kelola pemerintahan dengan model *collaborative governance* di Nagari Sungai Cubadak, dengan melihat aspek pertama pemerintah yang terdiri dari cepat tanggap ( *responsiveness* ), kepemimpinan ( *leadership* ), pemberdayaan ( *empowerment* ), kedua masyarakat ( *society* ) yang terdiri partisipasi ( *participation* ), manfaat ( *benefit* ), ketahanan budaya dan yang ketiga swasta ( *Private* ) yang terdiri dari dana ( *Fund* ) dan investasi. Peneliti melakukan wawancara kepada informan yaitu Wali Nagari Sungai Cubadaka, Camat Baso, Kabid Lembaga Nagari DPMN, Kabid Perencanaan Evaluasi Program Bappeda, Sekretaris Nagari, Ketua Bamus, Wakil KAN, Perantau dan Pengusaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Collaborative Governance dalam tata kelola pemerintahan Nagari Sungai Cubadak merupakan pendekatan yang relevan dan adaptif dalam menghadapi tantangan sebagai nagari baru definitif. Faktor pendukung kepemimpinan fasilitatif Walinagari, transparansi, serta jejaring yang kuat dengan aktor eksternal, dukungan eksternal dan jejaring, kehadiran teknologi dan akses digital yang makin meningkat serta nilai budaya musyawarah dan gotong royong dan Faktor penghambat terbatasnya pendampingan sumber daya manusia ( *SDM* ) dalam Collaborative Governance, kelembagaan yang lemah dari peran, maupun fungsinya. belum adanya regulasi lokal yang mendukung kolaborasi, keterbatasan anggaran dan alokasi untuk kegiatan kolaboratif.

**Kata Kunci:** tata kelola pemerintahan, collaborative governance

**ABSTRACT:** This study aims to analyze and describe governance with a collaborative governance model in Nagari Sungai Cubadak. A qualitative approach is used as a research method to find and describe the phenomena that occur in the field related to governance in Nagari Sungai Cubadak and identify factors that contribute to governance with a collaborative governance model in Nagari Sungai Cubadak, by looking at the first aspect of the government which consists of responsiveness, leadership, empowerment, second society which consists of participation, benefits, cultural resilience and the third private sector (Private) which consists of funds and investment. Researchers conducted interviews with informants, namely the Mayor of Nagari Sungai Cubadaka, Baso Sub-district Head, Head of the DPMN Nagari Institution, Head of the Bappeda Program Planning Evaluation Division, Nagari Secretary, Head of Bamus, Deputy of KAN, Migrants and Entrepreneurs. The results of the study indicate that the application of Collaborative Governance in the governance of Nagari Sungai Cubadak is a relevant and adaptive approach in facing challenges as a definitive new nagari. Supporting factors are the facilitative leadership of the Walinagari, transparency, and strong networks with external actors, external support and networks, the increasing presence of technology and digital access as well as the cultural values of deliberation and mutual cooperation and inhibiting factors are limited human resource (HR) assistance in Collaborative Governance, weak institutions from their roles and functions. the absence of local regulations that support collaboration, limited budgets and allocations for collaborative activities.

**Keywords:** governance, collaborative governance

## A. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa atau nagari merupakan unit pemerintahan terdepan yang berperan penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan berbasis komunitas. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah nagari memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya dan menetapkan kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Pemerintahan Nagari merupakan pemerintahan terendah yang menggantikan Pemerintahan Desa yang secara umum berlaku di Indonesia. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat sendiri, mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya dan memilih pimpinan pemerintahannya (Prima Putri, 2021).

Salah satu nagari yang baru saja memperoleh status definitif adalah Nagari Sungai Cubadak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022. Sebagai nagari hasil pemekaran, Sungai Cubadak dihadapkan pada berbagai tantangan tata kelola, termasuk kurangnya pengalaman birokrasi, keterbatasan infrastruktur pemerintahan, dan rendahnya kapasitas aparatur nagari dalam mengelola anggaran dan regulasi. Tantangan utama dalam penerapan model *Collaborative Governance* pada pemerintahan desa adalah kurangnya pemahaman akan pentingnya kolaborasi, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan dalam membangun komunikasi yang efektif, oleh karena itu, diperlukan strategi yang jelas untuk mengatasi hambatan tersebut, termasuk meningkatkan kapasitas perangkat desa, memfasilitasi forum dialog, dan menerapkan teknologi informasi untuk mendukung proses kolaboratif (Agranoff, R., & Mcguire, 2004). Lebih lanjut, keberhasilan model *Collaborative Governance* dalam pemerintahan desa juga sangat bergantung pada dukungan regulasi dan kebijakan dari tingkat yang lebih tinggi (Emerson *et al.*, 2012).

Dalam menghadapi kompleksitas ini, diperlukan pendekatan pemerintahan yang partisipatif dan adaptif, salah satunya melalui model *Collaborative Governance*. Model ini menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik (Emerson *et al.*, 2012). Dengan adanya kolaborasi yang baik, desa dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dan menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Tata kelola mencakup totalitas semua lembaga dan elemen masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah (Agus Dwiyanto, 2015).

*Collaborative Governance* menawarkan solusi dengan mengajak semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Melalui model ini, pemerintah desa dapat membangun jaringan yang lebih kuat dengan berbagai pihak, sehingga mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa (Ansell and Gash, 2007). Partisipasi multi-pemangku kepentingan ini juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya desa (Bryson, J.M., Crosby, B.C. and Stone, 2006). Selain itu, keberhasilan model *Collaborative Governance* dalam pemerintahan desa juga sangat bergantung pada dukungan regulasi dan kebijakan dari tingkat yang lebih tinggi (Emerson *et al.*, 2012). Pemerintah pusat dan daerah perlu memberikan arahan, pelatihan, dan insentif kepada desa-desa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip tata kelola kolaboratif. Dengan dukungan yang memadai, desa dapat lebih optimal mengembangkan model tata kelola yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebagai nagari yang baru setahun definitif Nagari Sungai Cubadak tentu memerlukan dukungan semua pemangku kepentingan terutama terkait tata kelola Pemerintahan. Hal yang ditemui berdasarkan fenomena di Nagari Sungai Cubadak adalah: pertama, minimnya pengalaman dalam mengelola anggaran, kedua rendahnya pemahaman perangkat nagari terkait regulasi tata kelola pemerintah dan keuangan nagari, ketiga kesejahteraan sosial

masyarakat belum membaik, keempat keterbatasan gedung kantor pemerintahan nagari yang kecil, satu kompleks dengan Sekolah Taman Kanak (TK) serta kelima keterbatasan pembangunan di nagari.

Dengan kondisi fenomena diatas, penting dan butuh pelibatan dari Pemerintah baik di Kabupaten maupun kecamatan, dari Nagari Induk, organisasi nonpemerintah, akademisi, perantau, pengusaha, pemuka masyarakat. Maka dengan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan bisa mengatasi kompleksitas tata kelola pemerintahan sehingga Nagari Sungai Cubadak berkembang lebih cepat dan mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif, responsif, serta berkelanjutan. Oleh karena itu, penerapan pendekatan *Collaborative Governance* telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam berbagai aspek, seperti keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan dana desa yang lebih transparan, dan penguatan ekonomi lokal melalui kemitraan dengan sektor swasta (Hajer, Maarten A & Wagenaar, 2003). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif dapat menjadi strategi yang efektif dalam memperbaiki tata kelola desa.

Pemerintah desa memainkan peran strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, desa memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya dan menetapkan kebijakan yang memenuhi kebutuhan warganya (Putnam, 2000). Ada beberapa alasan yang melatar belakangi adanya kolaborasi tiap lembaga atau institusi. Hal ini seperti *Collaborative Governance* tidak muncul secara tiba-tiba karena hal tersebut ada disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik (Junaidi, 2015). Selain itu *Collaborative Governance* atau kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi dan tingginya biaya dan adanya politisasi terhadap regulasi. Lebih positif lagi bahwa orang mungkin berpendapat bahwa kecenderungan ke arah kolaborasi muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kapasitas institusi atau lembaga (Ansell and Gash, 2007).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan *Collaborative Governance* dalam konteks pemerintahan desa. Studi oleh Garvera et al. (2021) menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat belum berjalan optimal dalam mendorong kemandirian desa. Sementara itu, Mauk et al. (2023) mengidentifikasi bahwa keberhasilan kolaborasi sangat bergantung pada kepercayaan antar aktor, komitmen terhadap proses, dan keterlibatan aktif masyarakat. Kemudian penelitian (Syamsurizaldi, putri, 2019) mendeskripsikan *collaborative governance* juga mendeskripsikan keberhasilan nagari rancang menemukan hasil penelitian bahwa nagari rancang memiliki potensi ekonomi dengan keterlibatan stake holder, keterbukaan dari pemerintah nagari, kolaborasi actor *governance* dari perencanaan program dari kegiatan. Penelitian Piani (2021) dengan hasil penelitian yang menunjukkan dialog tatap muka melibatkan tiga tahap yaitu tim koordinasi pembangunan kawasan perdesaan, masyarakat dan pihak ketiga dari akademisi dengan saling mendukung dalam proses koordinasi yang diselenggarakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Prabowo et al (2021) menemukan bahwa di Kabupaten Lampung Selatan sudah ada beberapa kegiatan prioritas di sektor ekonomi dan kesehatan, beberapa kegiatan prioritas tersebut seperti desa tanggap covid-19, pekerjaan intensif tunai desa, bantuan langsung tunai (blt) dana desa dan pembangunan infrastruktur lainnya. Namun demikian, mayoritas studi tersebut belum menyoroti secara mendalam bagaimana dinamika kolaboratif berlangsung pada nagari-nagari baru yang masih berada pada tahap awal pengembangan kelembagaan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan riset terkait bagaimana model *Collaborative Governance* diimplementasikan secara efektif pada konteks nagari yang baru terbentuk seperti Sungai Cubadak.

Urgensi kajian ini tidak hanya terletak pada kebutuhan praktis untuk meningkatkan kapasitas tata kelola nagari, tetapi juga pada pentingnya memperkaya kajian ilmiah tentang model tata kelola partisipatif di level pemerintahan paling bawah. Secara praktis, pemahaman mengenai pola interaksi antara pemerintah nagari, masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya dapat mendorong formulasi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif. Dari sisi ilmiah, kajian ini berkontribusi dalam mengisi celah literatur mengenai penerapan *Collaborative Governance* dalam konteks pemerintahan adat modern, khususnya di wilayah Sumatera Barat yang memiliki struktur sosial dan nilai budaya yang khas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi model *Collaborative Governance* dalam tata kelola pemerintahan Nagari Sungai Cubadak. Secara khusus, penelitian ini mengkaji aktor-aktor yang terlibat dalam proses kolaboratif, bentuk partisipasi yang terjadi, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, artikel ini mengeksplorasi bagaimana kolaborasi antarsektor berlangsung dalam merespons tantangan pembangunan di nagari baru yang sedang berkembang.

Kontribusi utama artikel ini terletak pada pemahaman konseptual dan praktikal tentang penerapan *Collaborative Governance* dalam konteks pemerintahan nagari. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tata kelola desa di Indonesia, memberikan dasar empiris bagi pembuat kebijakan dalam mendesain model kolaborasi yang efektif, serta mendorong lahirnya inovasi pemerintahan lokal berbasis partisipasi. Dengan demikian, studi ini tidak hanya memberikan gambaran situasional di Nagari Sungai Cubadak, tetapi juga menjadi referensi penting dalam pengembangan strategi tata kelola pemerintahan lokal yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana model *Collaborative Governance* diterapkan dalam tata kelola pemerintahan di Nagari Sungai Cubadak. Pendekatan kualitatif dipilih karena dinilai paling sesuai untuk mengeksplorasi dinamika sosial, aktor-aktor yang terlibat, serta bentuk interaksi kolaboratif yang terjadi di tingkat pemerintahan nagari. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik dari perspektif para pelaku yang terlibat langsung dalam proses pemerintahan dan pembangunan nagari.

Lokasi penelitian berada di Nagari Sungai Cubadak, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposif karena Nagari Sungai Cubadak merupakan nagari yang baru dimekarkan dan memiliki dinamika kolaboratif yang potensial untuk dikaji. Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan pada tahun 2024, dengan melibatkan berbagai aktor yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nagari.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan informan kunci, seperti Wali Nagari, perangkat nagari, tokoh masyarakat, pemuka adat, perantau, pelaku usaha lokal, dan pihak dari lembaga non-pemerintah. Informan dipilih secara purposif berdasarkan peran dan keterlibatannya dalam proses kolaborasi di pemerintahan nagari. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk memahami konteks sosial dan interaksi antar aktor. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi nagari, peraturan daerah, laporan kegiatan, dan publikasi lain yang relevan. Instrumen utama dalam pengumpulan data adalah pedoman wawancara semi-terstruktur yang dirancang berdasarkan komponen model *Collaborative Governance*, seperti kondisi awal, kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, dan proses kolaboratif (Ansell and Gash, 2007).

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, serta *member check* dengan informan untuk memastikan keakuratan interpretasi data. Keabsahan temuan atau uji kredibilitas data atau kepercayaan data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat. Digunakan uji ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai subyek penelitian (Sugiyono, 2011). Dalam penelitian ini, pengecekan kredibilitas dilakukan dengan menerapkan triangulasi data.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### 1. Pemerintah

Pemerintah Nagari Sungai Cubadak, terutama Wali Nagari dan perangkatnya, berperan dominan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan pembangunan. Pemerintah menjadi aktor utama dalam proses pengambilan keputusan melalui forum-forum formal seperti Musyawarah Nagari (Musnag). Wali Nagari menunjukkan inisiatif yang baik dalam menjalin komunikasi dengan berbagai pihak, namun kepemimpinan yang dijalankan masih cenderung top-down. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada figur pemimpin tunggal, sehingga belum tercipta kepemimpinan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Di sisi lain, kapasitas teknis aparatur nagari dalam memahami konsep *Collaborative Governance* masih terbatas. Selain itu, belum tersedia perangkat regulasi lokal yang mengatur pelibatan lintas sektor secara formal, serta belum terbentuk lembaga khusus yang dapat memfasilitasi kolaborasi secara sistematis. Fasilitas pemerintahan yang terbatas, seperti kantor nagari yang masih berbagi tempat dengan sekolah TK, juga menjadi kendala dalam efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

Penerapan *Collaborative Governance* di Nagari Sungai Cubadak dilihat dari aspek Pemerintah yang disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Penerapan *Collaborative Governance* di Nagari Sungai Cubadak dilihat dari aspek Pemerintah

Fokus	Temuan Lapangan	Analisa Tematik	Implikasi terhadap <i>Collaborative Governance</i>
Responsivines	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendampingan dari DPMN, Bappeda dalam hal Kelembagaan nagari dan RPJM/RKP Nagari</li> <li>- Sinkronisasi dengan nagari dan kabupaten terkait RPJM Kabupaten</li> </ul>	Kolaborasi vertikal dan teknokratik antara nagari dan kabupaten berupa koordinasi	Menunjukkan integrasi lintas level pemerintahan, menciptakan kebijakan yang sinergis dan partisipatif
Kepemimpinan	- Walinagari	Gaya kepemimpinan	Mendorong

	terbuka, konsultatif dan proaktif - Kepemimpinan yang komunikatif dan membaur	kolaboratif yang deliberatif	keterlibatan dan kepercayaan dalam proses pengambilan keputusan
Pemberdayaan	- Koordinasi dan komunikasi intensif - Pendampingan, pelatihan dan supervisi dari OPD	Penguatan kapasitas melalui kemitraan berkelanjutan	Pemerintah Nagari menjadi lebih mandiri dan berdaya dalam tata kelola lokal

## 2. Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam tata kelola nagari sudah mulai terlihat, terutama melalui forum Musnag. Namun, keterlibatan ini masih bersifat seremonial dan belum menyentuh aspek perencanaan bersama, pelaksanaan, hingga evaluasi program secara kolaboratif. Keterlibatan tokoh masyarakat, lembaga adat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), serta Bundo Kandung masih berdasarkan norma dan nilai budaya yang kuat, tetapi belum diberdayakan secara struktural dalam pemerintahan nagari. Modal sosial masyarakat seperti semangat gotong royong dan solidaritas sosial sebenarnya sangat tinggi, namun belum dikelola sebagai kekuatan kolaboratif dalam proses pembangunan. Masyarakat belum mendapatkan ruang partisipasi yang setara dan berkelanjutan, karena belum adanya forum dialog lintas sektor yang berlangsung secara rutin dan terstruktur. Ini menunjukkan perlunya fasilitasi dari pemerintah untuk menciptakan ruang partisipatif yang lebih deliberatif dan mendorong masyarakat sebagai mitra aktif dalam pembangunan nagari. Penerapan Collaborative Governance di Nagari Sungai Cubadak dilihat dari aspek Masyarakat disajikan pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Penerapan Collaborative Governance di Nagari Sungai Cubadak dilihat dari aspek Masyarakat

Fokus	Temuan Lapangan	Analisa Tematik	Implikasi terhadap Collaborative Governance
Partisipasi	- Keterlibatan Masyarakat dalam perencanaan - Partisipasi Masyarakat berupa pemikiran, tenaga, dana dan material	Peran sentral masyarakat	Menunjukkan peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan
Manfaat	- Dukungan lintas Pemerintah - Peningkatan akses layanan publik	Peningkatan Kinerja Pemerintah nagari	Pemerintah nagari menjadi lebih efektif dan efisien

Ketahanan Budaya	- Pelestarian dan penguatan nilai-nilai adat lokal	Eksistensi Kearifan lokal	Menunjukkan peran Pemerintahan Nagari dalam menjaga adat dan budaya nagari
------------------	--	---------------------------	--

### 3. Swasta

Sektor swasta di Nagari Sungai Cubadak, khususnya kelompok perantau dan pelaku usaha lokal, telah memberikan kontribusi positif, meskipun peran mereka masih berlangsung secara informal. Perantau menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan nagari melalui dukungan finansial dan sosial, terutama untuk pembangunan fisik, bantuan sosial, dan kegiatan adat. Sayangnya, kontribusi besar ini belum diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan yang terstruktur. Pelaku usaha lokal juga belum dilibatkan secara aktif dalam pengembangan ekonomi nagari atau kemitraan publik-swasta yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain itu, belum ada keterlibatan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun akademisi sebagai mitra strategis dalam pengembangan kapasitas, pendampingan teknis, maupun inovasi kebijakan. Ketiadaan skema kemitraan formal seperti forum komunikasi atau nota kesepahaman (MoU) mengakibatkan sektor swasta belum menjadi bagian integral dari tata kelola pemerintahan nagari.

Penerapan Collaborative Governance di Nagari Sungai Cubadak dilihat dari Aspek Swasta disajikan pada tabel 3 berikut:

Tabel 3. Penerapan Collaborative Governance di Nagari Sungai Cubadak dilihat dari Aspek Swasta

<b>Fokus</b>	<b>Temuan Lapangan</b>	<b>Analisa Tematik</b>	<b>Implikasi terhadap Collaborative Governance</b>
Modal	- Peran penting perantau dan pengusaha - Kontribusi Perantau dan pengusaha terhadap Nagari	Kolaborasi Strategis anatar pemerintahan nagari dengan perantau dan pengusaha	Menunjukkan integrasi yang signifikan terhadap tata kelola pemerintahan nagari
Investasi	- Kesejahteraan sosial masyarakat	Kolaborasi berbasis pembangunan sosial ekonomi	Mendorong penguatan dan kemandirian ekonomi sosial nagari

## Faktor-Faktor yang Berkontribusi dalam Tata Kelola Pemerintahan dengan Model Collaborative Governance di Nagari Sungai Cubadak

### 1. Faktor Pendukung

#### a. Kepemimpinan Kolaboratif dan Fasilitatif

Wali Nagari Sungai Cubadak, Yusmar Pakiah Basa, mempraktikkan kepemimpinan yang terbuka, demokratis, dan memiliki legitimasi kuat secara formal maupun kultural. Ia berperan sebagai fasilitator yang mampu menjembatani berbagai

kepentingan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah nagari membuka akses informasi publik secara luas, baik terkait program, keuangan, maupun kebijakan. Mekanisme pelaporan dan evaluasi bersama menciptakan kepercayaan masyarakat, serta mendorong iklim partisipatif yang berkelanjutan.

c. Dukungan Eksternal dan Jejaring Kolaboratif

Kolaborasi tidak hanya bersumber dari internal nagari, tetapi juga melibatkan pihak eksternal seperti perantau dan pengusaha. Dukungan ini memperluas akses sumber daya dan memperkuat posisi nagari dalam pembangunan. Hubungan strategis dengan pemerintah daerah dan legislator juga membuka peluang afirmasi kebijakan dan alokasi anggaran yang berpihak pada masyarakat nagari.

## 2. Faktor Penghambat

a. Keterbatasan Sumber Daya dan Kapasitas SDM Aparatur

Jumlah pegawai yang terbatas di tingkat OPD dan kecamatan berdampak pada minimnya pendampingan terhadap nagari. Aparatur nagari juga belum memiliki kompetensi dalam manajemen partisipatif dan fasilitasi musyawarah, sehingga forum-forum publik cenderung bersifat administratif dan kurang dialogis.

b. Kelembagaan Lokal yang Lemah

Lembaga-lembaga nagari seperti LPMN, Karang Taruna, dan Bundo Kanduang belum mampu berperan sebagai mitra strategis pemerintah. Minimnya kapasitas, pemahaman peran, dan dukungan pembinaan menyebabkan fungsi kelembagaan pasif dan administratif, serta tidak sinergis dengan elemen masyarakat lainnya.

c. Ketidakselarasan Regulasi Multi-Level

Regulasi dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten sering kali bersifat top-down dan seragam, tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan budaya lokal. Hal ini membatasi fleksibilitas pemerintah nagari dalam merespons isu-isu lokal, serta mempersempit ruang kolaborasi yang adaptif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan.

## Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa model *Collaborative Governance* di Nagari Sungai Cubadak masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Berdasarkan kerangka Ansell dan Gash (2007), kondisi awal (*starting conditions*) di nagari ini belum menciptakan tingkat kepercayaan yang cukup antara aktor, dan masih terjadi ketimpangan kekuasaan serta akses terhadap informasi. Pemerintah nagari cenderung menjadi aktor dominan dalam proses kolaboratif, sementara kontribusi pihak lain masih bersifat sukarela dan tidak sistematis. Kepemimpinan fasilitatif merupakan komponen penting dalam keberhasilan kolaborasi. Dalam konteks ini, peran wali nagari cukup signifikan dalam memfasilitasi hubungan antarpihak. Namun, belum adanya desain institusional yang kuat mengakibatkan proses kolaborasi tidak memiliki aturan main yang jelas. Hal ini berbeda dengan prinsip *Collaborative Governance* yang menekankan pada deliberasi, konsensus, dan akuntabilitas bersama dalam proses pengambilan keputusan.

Partisipasi masyarakat memang sudah dimulai melalui Musyawarah Nagari, namun belum sampai pada tahap pembentukan komitmen kolektif, kepercayaan timbal balik, dan perumusan kebijakan bersama. Dinamika kolaboratif lebih bersifat administratif daripada substantif. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi belum dipahami sebagai strategi tata kelola yang inklusif, melainkan masih sebatas formalitas prosedural. Keterbatasan kapasitas sumber

daya manusia dan dukungan regulasi juga menjadi penghambat utama. Kolaborasi cenderung berhenti pada tahap komunikasi awal tanpa keberlanjutan program dan evaluasi. Sesuai dengan model Emerson et al. (2012) dimensi dinamika kolaborasi seperti tindakan bersama dan penciptaan nilai kolektif masih belum berkembang secara signifikan di Nagari Sungai Cubadak. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan pentingnya desain kelembagaan yang mendukung kolaborasi, penguatan kapasitas aktor lokal, serta pengembangan mekanisme partisipatif yang sejati agar tata kelola pemerintahan nagari dapat berjalan lebih inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Collaborative Governance* di Nagari Sungai Cubadak merupakan pendekatan yang relevan dan adaptif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan nagari baru. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta telah berjalan secara sinergis, ditandai dengan kepemimpinan wali nagari yang fasilitatif, partisipasi aktif masyarakat, serta kontribusi strategis dari perantau dan pengusaha. Keberhasilan ini didukung oleh transparansi, jejaring eksternal yang kuat, dan responsivitas pemerintah. Namun demikian, model ini masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, kelembagaan lokal yang lemah, serta regulasi yang belum kontekstual terhadap kebutuhan nagari, sehingga diperlukan penguatan kapasitas dan penyesuaian kebijakan untuk mendukung keberlanjutan tata kelola kolaboratif.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Nagari Sungai Cubadak meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis dan pendampingan dari OPD terkait guna mendukung tata kelola yang lebih profesional dan partisipatif. Revitalisasi lembaga-lembaga lokal seperti LPMN, Karang Taruna, Bundo Kandung, dan lembaga adat juga perlu dilakukan melalui pembinaan berkelanjutan, alokasi dana operasional, serta pelibatan aktif dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Selain itu, pemerintah nagari diharapkan membangun jejaring strategis dengan perantau, pelaku usaha, akademisi, dan LSM untuk memperluas dukungan sumber daya dan kebijakan. Untuk memperkuat hasil studi ini, diperlukan riset lanjutan di wilayah lain dalam lingkup Kabupaten Agam guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang implementasi *Collaborative Governance* di tingkat nagari.

## E. REFERENSI

- Agranoff, R., & Mcguire, M. (2004) *Collaborative Public Management New Strategies for Local Governments*. Georgetown University Press.
- Agus Dwiyanto (2015) *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ansell and Gash (2007) 'Collaborative Governance in Theory and Practice', *Journal of Public Administration Research and Theory*, 5430571.
- Bryson, J.M., Crosby, B.C. and Stone, M.M. (2006) 'The Design and Implementation of Cross-Sector Collaborations Propositions from the Literature'.
- Emerson, K. et al. (2012) 'An integrative framework for collaborative governance', *Journal*

- of Public Administration Research and Theory*, 22(1), pp. 1–29. Available at: <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>.
- Garvera, R.R. *et al.* (2021) ‘Collaborative Governance Dalam Mewujudkan Desa Mandiri’, *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(3), pp. 502–513.
- Hajer, Maarten A & Wagenaar, H. (2003) *Deliberative Policy Analysis: Understanding in the Network Society*. Cambridge University Press.
- Junaidi (2015) ‘Collaborative Governance Dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik Di Kota Tanjungpinang’, *Naskah Publikasi*, pp. 1–35.
- Mauk, A.B. *et al.* (2023) ‘Kolaborasi Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Good Governancedi Desa Tohe Leten Kecamatan Raihat Kabupaten Belu’, *JianE: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(1), pp. 37–43.
- Piani, I. (2021) ‘Proses Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas’, *Public Policy and Management Inquiry*, 4(2), p. 134. Available at: <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2020.4.2.2442>.
- Prabowo, A. *et al.* (2021) ‘Model collaborative governance dalam pembangunan desa pada masa covid-19: studi di Kabupaten Lampung Selatan’, *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), pp. 15–31. Available at: <https://doi.org/10.26905/pjiap.v6i1.5393>.
- Prima Putri, R. (2021) ‘Pemilihan Walinagari Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Kabupaten Padang Pariaman’, *Ensiiklopedia of Journal*, 6.
- Putnam, R. (2000) *Bowling Alone : America’s Declining Social*.
- Sugiyono (2011) *Metode penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*.
- Syamsurizaldi, putri, A.A. (2019) ‘Model Collaborative Governance Pada Nagari Rancak di Provinsi Sumatera Barat’.